



## **Peran Konfusianisme terhadap *Counterfeiting* di China pada Rezim Hu Jintao**

**Faisal Aldi Ardiansyah Fabrin**

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro  
Jalan Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269  
Website:<http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

### **ABSTRACT**

This study aims to determine the persistence of counterfeiting in China which is also called shanzhai in Hu Jintao regime. This study also provides an overview of the factors that affect the persistence of counterfeiting or shanzhai in China. This study uses the theory of constructivism, which draws conclusions and from the data collected in the field. The results of this study indicate that in the regime of Hu Jintao, a change in the role of new identity in China is a capitalist communist who will create a policy that gave birth shanzhai in China. And the norm adopted by the Chinese community is Confucianism which later can affect the counterfeiting in China. In the norms of Confucianism adopted by this Chinese society, do not prohibit the existence of counterfeiting due to counterfeiting is something that does not violate the norm. Thus, both of these have an effect on the less efficient and less effective enforcement of intellectual property rights in China.

**Keywords:** *counterfeiting, Shanzhai, constructivism, confucianism, norm*

### **Pendahuluan**

China merupakan negara yang mempunyai pertumbuhan perekonomian pesat dengan adanya globalisasi. Dengan adanya globalisasi ini, China tumbuh sebagai negara yang cepat perkembangan ekonominya dalam bidang teknologi, perdagangan, industri maupun investasi sehingga menciptakan pasar bebas yang dapat mengurangi kemiskinan warga negara China. Globalisasi ini menciptakan perkembangan-perkembangan kekayaan intelektual yang terjadi pada bidang manapun di negara China ini. Warga negara China dengan kreativitas dan inovasi itu memperluas dan menciptakan kekayaan intelektual untuk mendatangkan kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi. Namun kenyataannya, China juga termasuk negara yang melakukan *counterfeiting* dan pembajakan merek dagang terbesar, walaupun China sudah menjadi anggota WTO pada tanggal 11 Desember 2001 yang kemudian mengharuskan melaksanakan ketentuan-ketentuan TRIPs secara utuh. Pada tahun 2003-2013 merupakan pemerintah Hu Jintao, dimana pada masa pemerintahan Hu Jintao terjadi dalam dua periode secara langsung banyak kasus *counterfeiting* yang semakin meningkat. Namun, pada penelitian ini ditekankan pada rezim Hu Jintao yang periode kedua pada tahun 2007-2013. Pada tahun tersebut terjadi peningkatan kasus pemalsuan, dimana pada tahun 2012 menjadi puncak peningkatan pemalsuan yang mempunyai 501 kasus yang ada di China ([www.wipo.int](http://www.wipo.int)).

Adapun dilakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa pada pemerintahan Hu Jintao melakukan pelanggaran ketentuan mengenai *counterfeiting* yang sudah jelas pada aturan *World Trade Organization* yang pada di TRIPs dan mengetahui peran identitas baru di China yaitu komunis kapitalis yang nantinya menciptakan sebuah kebijakan yang melahirkan shanzhai di China. Dan norma yang dianut oleh masyarakat China yaitu konfusianisme yang nantinya dapat mempengaruhi pemalsuan yang ada di

China. Dalam norma konfusianisme yang dianut oleh masyarakat China ini, tidak melarang adanya pemalsuan karena pemalsuan merupakan hal yang tidak melanggar norma. Jadi, dengan adanya kedua hal tersebut berpengaruh pada penegakan hukum mengenai hak kekayaan intelektual di China yang kurang efisien dan kurang efektif.

Penelitian ini menggunakan teori konstruktivisme untuk menjelaskan kaitan pengaruh identitas China dan norma yang dianut masyarakat China yang sudah diyakini ribuan tahun yang lalu terhadap pemalsuan yang ada di China. Konstruktivisme memandang konflik dan kerjasama bukanlah suatu interaksi atau sistem secara tanpa disengaja yang menghasilkan kegiatan, namun hal itu disengaja dibuat atau diciptakan yang dilakukan oleh aktor-aktor yang ada dibelakangnya untuk kepentingan (Rosyidin, 2015:8). Identitas menurut konstruktivisme adalah atribut yang dimiliki oleh setiap aktor yang bertujuan untuk menghasilkan kepentingan sekaligus menjadi pendorong tindakan dari kepentingan yang dibentuk (Rosyidin, 2015:48). Bagi konstruktivisme norma merupakan sebuah harapan-harapan tentang kepantasan dalam standar perilaku bagi komunitas internasional. Jadi apa yang dipandang pantas akan dilakukan negara. (Rosyidin, 2015:67-71).

Dengan kedua konsep yang ada di atas, identitas dan norma saling berkaitan erat. Kedua konsep tersebut mempunyai inti yang sama yaitu identitas dan norma sama-sama membentuk kepentingan dan kepentingan mendasari tindakan. Norma berperan sebagai pembentuk identitas agen sehingga dengan norma, agen bisa mengetahui siapa dirinya. Dengan mengetahui siapa dirinya, agen dapat menentukan kepentingan apa yang ingin dicapai, lalu menentukan tindakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai kepentingan tersebut. Tidak jarang seorang aktor satu dengan aktor satu lain memiliki perbedaan dalam memahami dan melihat sesuatu. Maka sebuah hal yang wajar jika seorang aktor memperjuangkan apa yang dia anggap benar (Hudson, 2007:105-107).

## **Pembahasan**

Di kasus ini adanya dua norma yang berbeda dalam melihat pemalsuan atau *counterfeiting* yaitu dari norma internasional (*World Trade Organization*) dan norma domestik masyarakat China (Konfusianisme). Norma *World Trade Organization* melalui TRIPs dalam memandang pemalsuan adalah sebagai pelanggaran yang mengharuskan setiap negara peserta untuk memerangi atau melawan tindak pemalsuan dan pembajakan merek dagang yang telah merugikan negara lain (Matsubara, 2003:1). Sedangkan norma yang dianut oleh masyarakat China adalah norma konfusianisme yang berbeda dalam melihat pemalsuan. Dalam pandangan konfusianisme ini menganggap pemalsuan sebagai bentuk sanjungan yang paling tulus dan komponen penting dari proses kreatif (Boyle, 1996:54). Norma internasional ini telah ditolak oleh masyarakat China mengenai pemalsuan dikarenakan tidak sesuai dengan norma yang sudah dianut oleh masyarakat China yaitu konfusianisme. Cocok tidak cocoknya norma internasional ditentukan oleh norma domestiknya dan dipengaruhi oleh faktor domestik (Rosyidin, 2015:84).

Setelah kekalahan China di perang opium, masyarakat China sadar dengan keterbelakangannya sehingga seluruh masyarakat China ragu dan ada rasa takut terhadap teknologi, gagasan dan institusi yang dibuat oleh orang barat (Yu, 2007:21). Dari rasa takut terhadap orang asing dan barang asing ini, China melakukan percepatan modernisasi dengan kebiasaan norma kofusius yang dimana pemalsuan merupakan bentuk sanjungan dari proses kreatif mereka (Boyle, 1996:54) dan sebagai sentimen nasionalis orang-orang China yang melepaskan frustrasi mereka pada orang asing dan perusahaan asing (Yu, 2007: 21).

Menjelang abad ke-20, industri dan investasi asing mendominasi hampir semua industri dan perusahaan modern di China karena percepatan modernisasi yang dilakukan

China. Ketika Deng Xiaoping berkuasa pada akhir 1970-an, dia mengadopsi pendekatan yang berbeda dan lebih pragmatis. Alih-alih menempatkan "politik yang mengkomando", Deng melihat kekayaan ekonomi sebagai fondasi kekuatan China (Zheng, 1999:17). Dengan demikian, Deng dengan penuh semangat mendorong Empat Modernisasi, perpanjangan hubungan diplomatik dan komersial dengan Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara maju Barat lainnya, dan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus, dari sinilah perubahan identitas China dari komunis sosialis menjadi komunis kapitalis yang nantinya akan dilanjutkan oleh pemimpin-pemimpin China berikutnya (Crane, 1994:148). Disini adanya fungsi norma sebagai fungsi konstitutif, dimana norma ini berfungsi sebagai pembentukan identitas dan kepentingan aktor (Rosyidin, 2015:76). Norma konfusius memandang politik sebagai hubungan keluarga seperti ayah dan anak yang selalu memberi arahan yang benar atau mengomando (Wasserstrom, 2014:5). Dijelaskan diatas bahwa pada pemerintahan Deng Xioping politiknya masih menggunakan arahnya. Namun, Deng mempunyai kepentingan di bidang ekonomi yang membuat identitas China berubah ke komunis kapitalis untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat di China.

Pemalsuan terjadi di kota Shenzhen yang terletak di provinsi Guangdong yang termasuk di wilayah kawasan ekonomi khusus dan tersebar lagi ke wilayah provinsi lain yang masih termasuk zona ekonomi khusus. Pemalsuan terbanyak di zona ekonomi khusus dikarenakan tingkat pajak yang rendah, prosedur administrasi dan bea cukai yang lebih sedikit dan disederhanakan, dan impor komponen dan persediaan bebas bea (Dimitrov, 2009:62). Jadi adanya norma konfusianisme mengenai pemalsuan dan identitas komunis kapitalis memicu peningkatan pemalsuan di China.

Bertahannya *counterfeiting* pada Rezim Hu Jintao dapat dilihat dari sudut pandang teori yang digunakan yaitu komunis kapitalis atau bisa juga disebut dengan sistem campuran. Dalam sistem ekonomi campuran pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta dalam menjalankan kegiatan perekonomian (Sardiman, 2006: 80). Dimana, China menggunakan sistem campuran ini untuk menambah perekonomian China yang dimana peran pemerintahan masih penting dalam tujuan pemerataan perekonomian yang dilaksanakan rakyatnya yang sudah bebas dalam memproduksi barang, disini sistem ekonomi adanya pengontrolan dari pemerintahan China dengan legitimasi dan konstitusi sedangkan dari sistem ekonomi kapitalis untuk membebaskan rakyat China untuk bebas dalam memproduksi barang secara kreatifitasnya. Ekonomi campuran adalah kompromi antara kapitalisme dan komunisme. Ekonomi campuran mengambil fitur berharga dari keduanya. Beberapa ekonomi campuran dapat dimiringkan lebih ke arah komunisme dan beberapa dapat dimiringkan lebih ke arah kapitalisme. Namun, kebanyakan negara dapat diklasifikasikan sebagai negara campuran di dunia nyata. Ada beberapa asumsi dasar dari ekonomi campuran komunis kapitalis yaitu (Shaikh, 2012): (1). Koeksistensi Sektor Publik dan Swasta. Dalam ekonomi campuran, sektor publik dan swasta bekerja sejajar satu sama lain. Biasanya, sektor publik bertanggung jawab untuk menyediakan transportasi, komunikasi, pertahanan, manajemen mata uang, utilitas seperti telepon, air, gas, listrik dll. Semua industri lainnya berada dalam kepemilikan sektor swasta. (2). Peraturan Pemerintah dan Harga. Tidak seperti Kapitalisme, intervensi pemerintah di pasar untuk mengatur harga. Pemerintah memberi subsidi untuk mendorong produksi kebutuhan dan ketersediaannya yang murah bagi masyarakat miskin. Di sisi lain, tarif tinggi dikenakan pada kemewahan dengan permintaan inelastis. (3). Deregulasi, Liberalisasi dan Privatisasi. Pemerintah di negara ekonomi campuran mendorong sektor swasta untuk mengambil perusahaan sektor publik yang tidak berjalan efisien atau dapat lebih baik dijalankan oleh sektor swasta. Ini memungkinkan pemerintah bertindak sebagai regulator dan bukan sebagai badan usaha.

Disini peran pemerintah China sudah jelas sangat penting dalam membuat kebijakan-kebijakan mengenai perekonomian China. Pada masa Hu Jintao, *counterfeiting* lahir dari kebijakan yang dia terapkan pada tahun 2006 yang lalu, dimana pada bulan Januari 2006, pada Konferensi Nasional Presiden Sains dan Teknologi Hu Jintao berjanji untuk membangun China menjadi "negara yang berorientasi inovasi" pada tahun 2020 (*chuangxin xing guojia*). Indikator patokan untuk transformasi ini adalah peningkatan inovasi berbasis sains dan teknologi dari 39 persen menjadi 60 persen dan peningkatan investasi yang sesuai dalam Litbang menjadi 2,5 persen dari PDB (Li, 2011). Visi tersebut mencakup mempromosikan "inovasi produk asli" (*zizhu chuangxin*), terutama kapasitas untuk menghasilkan teknologi dan standar jaringan inti daripada mengandalkan negara maju. Kebijakan ini dapat dilihat dalam Rencana Menengah Jangka Menengah China untuk Pengembangan Sains dan Teknologi (MLP).

Dari kebijakan inovasi yang diterapkan oleh pemerintahan China rezim Hu Jintao lahirlah *counterfeiting* yang dikenal dengan sebutan Shanzhai atau pemalsuan versi masyarakat China. Shanzhai ini diterapkan pertama di wilayah kota Shenzhen di China. Kegiatan shanzhai di wilayah sekitar Shenzhen dapat digambarkan sebagai cluster/kelompok industri dan lingkungan inovatif. Ide utamanya di sini adalah peran UKM yang inovatif dan jaringan mereka, baik formal maupun informal dan gagasan "pembelajaran bersama" (Keane, 2007). Faktor umum dalam kelompok industri dan lingkungan inovatif adalah ekonomi eksternal yang terlokalisasi. Dengan kata lain, manfaat bagi kolaborasi bisnis yang bersaing di pasar yang sama namun bekerja sama dalam pengembangan pengetahuan serupa dengan perusahaan asing dengan kualitas berbeda. Budaya Shanzai ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat China maupun pemerintah China dikarenakan dapat mempengaruhi kemajuan perekonomian, selain itu pemerintah China juga mendukung perusahaan-perusahaan yang menggunakan budaya shanzhai seperti perusahaan Huawei dan Xiaomi.

Inti dari bertahannya *counterfeiting* atau shanzhai ini selain dari kebijakan inovasi produk asli dan fenomena shanzhai tapi ada pengaruh dari kurang efisiennya penegakan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di China yang membuat kegiatan shanzhai itu bertahan. Penjelasan lebih lanjut akan mengenai kebijakan inovasi produk asli masyarakat dan budaya fenomena shanzhai dapat dilihat di bawah ini.

### *Konfusianisme dan "Shanzai"*

*Counterfeiting* di China ini sudah ada dan sudah melekat sebagai kebudayaan yang meniru, menyalin atau menjiplak pada zaman kekaisaran China sampai sekarang. Dahulu orang China pada zaman kekaisaran dalam kebudayaannya orang diharuskan untuk menyalin beribu-ribu surat maupun kitab untuk dipelajari ataupun untuk melaksanakan tugas yang diperintah seorang raja (Hamilton, 1996:613). Kebiasaan tersebut dikarenakan adanya aliran Konfusianisme yang bertujuan untuk mendidik dan menekankan agar manusia dapat melayani negara dan masyarakat (Wasserstom, 2014:5). Untuk memahami ajaran Konfusius tersebut perlu dipahami Kitab Daxue (Ajaran Agung) yang berisi ajaran mengenai etika, yaitu etika dalam keluarga, masyarakat, dan bernegara. Ajaran Agung merupakan inti dari Ajaran Konfusius untuk mendidik dan membangun manusia mencapai prestasi. Jadi, semua tergantung pada pemimpin atau raja, apa yang disuruh seorang raja harus dilaksanakan walaupun itu kegiatan menjiplak, meniru ataupun menjiplak (Hamilton, 1996:619)..

Tidak seperti orang Barat saat ini, orang China di masa lalu pada zaman kekaisaran tidak menganggap menyalin atau meniru sebuah pelanggaran moral. Sebaliknya, mereka menganggapnya sebagai "seni mulia," sebuah "proses belajar yang dihormati" di mana orang-orang mewujudkan penghormatan terhadap nenek moyang mereka. Pada usia yang

sangat muda, anak-anak China diajari untuk menghafal dan menyalin pelajaran klasik dan sejarah. Ketika mereka dewasa, mereka akan menjadi pelatih bahasa yang umumnya membentuk bahasa universal mereka ataupun menjadi sejarawan klasik. Meskipun praktik kutipan yang tidak diketahui kemungkinan akan dianggap plagiarisme saat ini, praktik semacam itu adalah komponen proses kreatif yang dapat diterima, sah, atau bahkan perlu, di masa lalu kekaisaran. Memang, para penulis Tionghoa awal melihat diri mereka lebih sebagai pemelihara catatan sejarah dan warisan budaya daripada sebagai pencipta. Bahkan Konfusius dengan bangga mengakui di *Analects* bahwa dia telah "mentransmisikan apa yang diajarkan kepadanya tanpa membuat apa pun dari miliknya sendiri." (Peter K. Yu, 2007).

Akhirnya, di bawah visi Konfusianisme tentang peradaban, keluarga merupakan unit dasar komunitas manusia, dan dunia merupakan hasil dari unit dasar itu. Karena China menekankan nilai keluarga dan hak kolektif, mereka tidak mengembangkan konsep hak individu. Mereka juga tidak menganggap kreativitas sebagai properti individu. Sebaliknya, mereka menganggap kreativitas sebagai keuntungan kolektif bagi komunitas dan keturunan mereka (Bary, 1998).

Shanzhai" atau budaya peniru merupakan bagian integral masyarakat China; Masyarakat sebagian besar adalah Konghucu dan tradisi *Confucianism* mempromosikan individu berbagi apa yang mereka ciptakan dengan masyarakat untuk mempromosikan keharmonisan yang lebih besar (Karthik, 2009:56). Oleh karena itu apa pun dari sepatu sampai ponsel disalin dan dijual secara terbuka di pasar di seluruh negeri. China saat ini adalah produsen produk palsu terbesar di dunia. Di China sendiri *counterfeiting* bisa disebut sebagai budaya fenomena "shanzhai". "Shanzai" sendiri adalah suatu hal yang merujuk pada bandit yang diluar kendali pemerintah, namun sekarang istilah tersebut untuk barang palsu atau bajakan. Namun dapat juga merujuk sebagai hal-hal yang mengenai improvisasi atau buatan sendiri. Budaya "shanzhai" ini atau bisa juga disebut bentuk budaya *counterfeiting* China dapat membuat perkembangan perusahaan-perusahaan yang ada di China (Kate Li, 2009:1). Budaya "shanzai" ini memang merupakan sebuah pelanggaran namun budaya ini dapat menaikkan perekonomian China. Dengan adanya budaya shanzhai ini perekonomian Cina telah mengalami hampir tiga dekade pertumbuhan ekonomi yang pesat dengan peningkatan PDB hampir 8% per tahun, sebuah keajaiban dalam sejarah ekonomi dunia. Bahkan selama krisis keuangan Asia pada tahun 1997 dan krisis keuangan saat ini, PDB China terus tumbuh per tahun sampai sekarang (Yuan Gao, 2010:5).

Fenomena shanzhai menganjurkan sebuah kelompok makro, membuat "wilayah belajar" yang sangat berjejaring dimana modalitas inovasi inkremental tertentu telah memperoleh kekuasaan (Gu dan Lundvall, 2006). Inovasi Shanzhai menunjukkan daerah sekitar Shenzhen meskipun ini bisa dibilang bergejala dengan gaya "nasional" yang lebih luas. Dalam konteks ini, model inovasi shanzhai bertentangan dengan visi pilihan negara tentang kelompok industri dan merek nasional yang kuat. Namun, nilai aktivitas shanzhai terhadap ekonomi provinsi cukup besar, terutama karena nilai yang diperoleh tidak muncul dalam statistik resmi.

Produk shanzhai yang paling terkenal tidak diragukan lagi adalah ponsel shanzhai (shanzhaiji). Awalnya ponsel shanzhai adalah produk tiruan "non-brand" yang ditampilkan beberapa fungsi dengan biaya sangat rendah (CCID, 2009). Banyak produsen peralatan asli (*Original Equipment Manufactur/OEM*) yang berkerumun di wilayah Delta Sungai Mutiara berusaha bersaing dengan merek-merek terkemuka di dunia. Beberapa produk membawa nama peniru seperti "Hi-Phone", "Nokla" atau Motololah. Dengan produk shanzhai yang berada dalam ekonomi informal, tidak adanya pajak pertambahan nilai 17%, biaya lisensi

jaringan dan pajak penjualan, serta tidak adanya layanan pemasaran dan purna jual, menghemat biaya.

Terlepas dari masalah yang masih ada ini, keberhasilan produsen perangkat ponsel shanzhai menunjukkan model inovasi asli China. Di Cina perangkat semacam itu telah menjadi simbol semangat shanzhai. Awalnya identik dengan kualitas buruk, produsen perangkat ponsel shanzhai telah dengan cepat mengubah "menjadi adapter dan inovator asli yang muncul, dari tidak hanya desain industri dan perspektif tangkapan permintaan lokal, tetapi juga terobosan teknologi inti seperti rancangan sirkuit terpadu (IC) keseluruhan solusi total sistem telepon dan integrasi regional rantai pasokan" (Zhu & Shi, 2010:31). Lebih penting lagi, mereka telah berhasil menantang pejabat industri dan mengganggu pasar dengan inovasi mereka.

Fenomena shanzhai muncul sebagai akibat dari faktor "lunak" (budaya China, sejarah, dan konteks pembuatan kebijakan / peraturan) dan faktor "keras" (penawaran dan permintaan pasar). Ini termasuk pola pikir "tak kenal takut", pembuatan kebijakan industri yang relatif lemah, tidak konsisten / tidak transparan, sifat pasar China yang berkembang, terutama pasar pedesaan yang kurang terlayani dan kelas menengah, calon industri yang mapan "pemahaman pasar lokal yang tidak memadai , serta kapasitas produksi yang kuat di dalam ekosistem.

### **Kesimpulan**

China melanggar ketentuan *world trade organization* tentang hak kekayaan intelektual dengan cara melakukan *counterfeiting* atau pemalsuan disebabkan oleh pengaruh konfusianisme yang tidak melarang adanya pemalsuan yang nantinya membuat kebiasaan masyarakat China untuk melakukan *counterfeit* itu yang juga disebut shanzhai. Adanya perubahan identitas negara China yaitu komunis kapitalis, dimana dalam identitas ini pemerintah China membuat suatu kebijakan yang mendorong *counterfeit* lebih meningkat yaitu dengan kebijakan inovasi produksi asli. Kaum konfusianisme tidak menggunakan konsep hukuman karena menurut mereka konsep hukuman merupakan hasil akhir jika tidak ada resolusi dan menurut konfusianisme hukuman itu untuk pelanggaran kekerasan fisik bukan yang lain. Sehingga hukum mengenai hak kekayaan intelektual di China tidak berjalan sebagaimana semestinya.

### **Referensi**

- Bary. D. T, (1998). *Asian Values and Human Right: A Confucian Communitarian Perspective*. London: Harvard Univesity Press
- Boyle. J. (1996). *Law and The Construction of The InfomationSociety*. New York: American University Press
- Crane. T. G, (1994). Special Things in Special Ways: National Economic Identity and China's Special Economic Zone. *The Australian Journal of Chinese Affairs*, Vol. 22. No 32, pp.71-92
- Dimitrov, Martin K. (2009). *Piracy and the State: The Politics of Intellectual Property Rights in China*. New York: Cambridge University Press
- Gao. Y, (2010). *An Analysis of Chinese "Shanzhai" Economic*. Swedia: Lund University Press
- Hamilton. A. M, (1996). The TRIPs Agreement: Imperialistic, Outdated, Overprotective. *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, Vol. 29. No . 29 pp. 613-619
- Hudson. M. V, (2007). *Foreign Policy Analysis Second edition Classis and Contemporary Theory*. United Kingdom: Rowman & Littlefield Publisher, Inc.
- Li. K, (2009). *Shanzhai A Chinese Phenomenon*. China: Booz & Compani Inc.

- Peter K. Yu, 2007. *The Second Coming of Intellectual Property Right in China*. *School of Law Yeshiva University*
- Rosyidin. M. (2015). *The Power of Ideas Konstruktivisme dalam Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta : Tiara Wacana
- Salman. S (2012). “*Comparative Economic Systems: A Brief Review*”. Islamic Project: Paper No. 42499
- Sardiman, (2006). *Ekonomi Dunia Kesehatan Kita*. Yogyakarta: Yudistira
- Wasserstrom. N. J (2014). *Tiongkok di Abad 21 Yang Perlu Diketahui Semua Orang*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Zheng. Y. (1999). *Discovering Chinese Nationalism in China. Modernization, Identity and International Relation*. New York: Cambridge University Press
- Zhu. S dan Shi. Y, (2010). “Shanzhai Manufacturing – An Alternative Innovation Phenomenon in China: Its Value Chain and Implications for Chinese Science and Technology Policies”. *Journal of Science and Technology Policy in China*. Vol 1, No. 1, pp. 29-49.